

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA



- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI **JUN** JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2006

Izin Pinjam Pakai Lahan Tak Akan Dihapus

[JAKARTA] Departemen Kehutanan tidak akan mencabut Peraturan Menteri (Permen) Kehutanan Nomor 14/2006 tentang izin pinjam pakai lahan, kendati banyak perusahaan tambang yang mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut.

Terkait pengenaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar satu persen yang akan diberikan bagi perusahaan yang tidak dapat menyerahkan lahan kompensasi, masih menunggu keputusan presiden. Hal itu dikatakan Menteri Kehutanan MS Ka'ban di Departemen Keuangan, Kamis (1/6) pagi.

Menhut menjelaskan, Departemen Kehutanan berprinsip bahwa Permen 14/2006 itu justru akan membuat kemudahan-kemudahan untuk usaha investasi di bidang pertambangan yang berhubungan dengan pinjam pakai lahan.

"Dua tahun itu masa mempersiapkan, jadi selama masa mempersiapkan itu mereka boleh beraktivitas, melakukan kegiatan misalnya eksplorasi," kata Kaban.

Menurut dia, Permen itu dikeluarkan dalam rangka merespons dan menjawab beberapa persoalan yang akhir-akhir ini muncul berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan itu disebutkan, kewajiban menyediakan dan menyerahkan tanah kompensasi tetap diberlakukan, tetapi jika dalam waktu dua tahun tidak dapat menyerahkan lahan

kompensasi, maka bagi pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial, lahan kompensasi dapat diganti dengan PNPB Kehutanan sebesar satu persen dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh jumlah produksi.

Kaban menjelaskan, kuitipan PNPB sebesar satu persen dari produksi tersebut masih menunggu Keputusan Presiden apakah berupa peraturan pemerintah atau berupa Keppres. Tetapi, yang penting adalah perusahaan pertambangan itu tetap melakukan aktivitas. Peraturan Menteri Kehutanan ini, menurut dia, diberlakukan untuk semua perusahaan tambang yang ada di Indonesia.

Sebelumnya, ketentuan royalti sebesar satu persen tersebut diprotes kalangan pengusaha dan Departemen ESDM. Direktur Eksekutif PT Interex Sacra Raya, Frans Nongka mengatakan, angka satu persen itu sebanding dengan ribuan kali lebih besar dari nilai pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditagih Departemen Keuangan dan Iuran Tetap yang ditagih Departemen ESDM.

Sedangkan, Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Simon Sembiring mengatakan, kebijakan sektor kehutanan yang cenderung menghambat industri pertambangan itu membuat para investor asing pikir-pikir untuk menanamkan modal di Indonesia.

[L-10/H-13]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: T S

TAHUN 2006

Dephut *ngotot* kenakan pajak usaha pertambangan

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Departemen Kehutanan tetap akan menerapkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 1% kepada pengusaha pertambangan setelah terbit keputusan presiden.

Dephut juga tetap akan mewajibkan pengusaha tambang yang memiliki konsensi di areal hutan lindung untuk menyerahkan lahan pengganti. Pengusaha tambang diberi waktu selama dua tahun untuk mencari lahan pengganti.

Kebijakan tersebut terkait dengan konsistensi Dephut dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.14/Menhut/II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Dalam Permenhut tersebut, disebutkan apabila dalam jangka waktu dua tahun pemohon pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat menyerahkan lahan kompensasi, maka khusus untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial lahan, kompensasi diganti dengan dana yang dijadikan PNBP Dephut yang besarnya mencapai 1% dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh jumlah produksi.

Pemberlakuan PNBP tersebut ditolak tegas para pengusaha pertambangan. Para pengusaha menginginkan angka 1% diambil dari bagi hasil 13,5% hak

pemerintah dalam PKP2B (perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara) yang juga merupakan PNBP.

Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban mengatakan PNBP sebesar 1% akan diberlakukan setelah ada restu dari Presiden.

Menurut dia, pada prinsipnya kebijakan tersebut tidak menghambat investasi di sektor pertambangan.

"Pada prinsipnya, Dephut akan memberikan langkah-langkah kemudahan dalam meningkatkan investasi," ujarnya usai pertemuan dengan para pengusaha pertambangan di Kantor Menko Perekonomian di Jakarta, kemarin.

Selama masa persiapan (penyerahan lahan pengganti), Dephut tetap memberikan izin eksplorasi selama dua tahun.

"Kalau mereka [pengusaha pertambangan] ternyata tidak bisa menyiapkan lahan penggantinya [selama dua tahun], maka mereka harus bayar PNBP, jadi Permen-nya itu tetap untuk PNBP tunggu keputusan Presiden, dan tunggu peraturan pemerintah. Yang

penting mereka melakukan aktivitas terlebih dulu."

Kaban menegaskan peraturan tersebut berlaku untuk semua perusahaan tambang yang kena pinjam pakai kawasan hutan.

Dalam Permenhut tersebut juga disebutkan kompensasi merupakan suatu kewajiban bagi pengguna atau peminjam kawasan hutan untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan yang direboisasi untuk dijadikan kawasan hutan, atau sejumlah dana yang dijadikan PNBP Dephut.

Sementara izin pinjam pakai kawasan hutan juga dilaksanakan atas dasar persetujuan Menteri Kehutanan.

Tim interdep

Di tempat yang sama, Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA) dan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono mengatakan pertemuan tersebut belum ada hasil yang signifikan.

Namun, katanya, pemerintah akan membentuk tim interdep yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian untuk membahas hal itu.

Pemerintah menjanjikan akan ada pertemuan lanjutan antara pengusaha, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dephut, Depkeu, se-

minggu atau 10 hari ke depan.

Menurut Jeffrey, pengusaha tidak memaksa Dephut untuk mencabut Permenhut tersebut. Namun, Permenhut tersebut disesuaikan dengan kondisi, sehingga iklim investasi akan lebih kondusif.

Dia menilai pemberlakuan PNBP 1% dari produksi yang diterapkan Dephut, sangat memberatkan pengusaha pertambangan.

Pasalnya, pengusaha selama ini sudah banyak menanggung pajak.

Dia menilai aneh pemberlakuan PNBP tersebut karena tidak ada negara di manapun yang memberlakukan peraturan tersebut.

Selain itu, lanjut Jeffrey, para pengusaha tambang tidak mudah mencari lahan pengganti, apalagi dengan luasan seperti yang ditetapkan Dephut. "Mencari lahan itu susah, karena sudah dikavling-kavling," katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono berjanji

pemerintah akan mengakomodasi semua permasalahan di sektor pertambangan, termasuk masalah pertambangan di hutan, dengan cara melakukan sinkronisasi antara kepentingan pengusaha dengan pemerintah.

(K18) (redaksi@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2006

Lawmakers target Freeport bosses

Tb. Arie Rukmantara
The Jakarta Post/Jakarta

Lawmakers should summon top Freeport executives to explain the alleged environmental damage and human rights abuses at the firm's Grasberg mine in Papua, a team of legislators says.

Speaking Thursday at the House of Representatives, legislators sent to monitor the mining giant's activities in Papua urged House Speaker Agung Laksono to summon PT Freeport Indonesia president commissioner James R. Moffett and other top management from Freeport's U.S. parent company to a House hearing.

Tjatur Sapta Edy, the secretary of the House working committee on Freeport, said

Thursday the request had been submitted to the House leaders and Agung was expected to decide on it next week.

Moffett heads the board of directors of the New Orleans-based Freeport McMoRan Copper and Gold Inc.

Tjatur said the working committee wanted to hear Freeport executives' response to allegations made by NGOs and community groups about environmental damage at the mine site.

The House was also concerned about accusations the company had hired soldiers from the Indonesian Military to guard the mine. Activists allege soldiers working for Freeport committed human rights abuses against the native Papuan population in the area.

PT Freeport management

has said the company's operations were in compliance with all the country's laws.

Tjatur said the committee had concluded the government must revise its current working contract with Freeport to create a more equal profit-sharing arrangement, to provide more funds for local community development programs and to reduce the environmental damage the mine caused.

PT Freeport spokesman Siddharta Moersjid said he had not received any information about the planned summons but was optimistic his bosses would cooperate.

"Basically, we have cooperated, and will always cooperate with anyone here to continuously improve our performance," he said.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/> 	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : TG		TAHUN 2006

Antam bakal gaet asing bidik Newmont Horas

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: PT Aneka Tambang Tbk berencana membentuk konsorsium dengan pihak asing guna mengambil alih pertambangan emas Martabe di Sumatra Utara milik PT Newmont Horas Nauli (NHN). Pembentukan konsorsium tersebut sekaligus mengatasi soal pendanaan dalam kegiatan eksplorasi pertambangan emas tersebut kelak.

PT Antam memang sudah jauh hari berencana mengakuisisi PT Newmont Horas Nauli untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang didapat dari tambang Martabe.

Hingga kini, perusahaan itu masih mempelajari sejumlah data mengenai kandungan mineral di wilayah tersebut.

Saat ini, Antam tercatat sebagai salah satu peserta tender tambang Martabe yang sedang diproses oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dirut PT Antam Deddy Aditya Soemanegara mengatakan pihaknya telah menjadi anggota tender dalam pengambilalihan pertambangan emas Martabe. Karena itu, manajemen menilai perlu membentuk konsorsium dengan pihak asing.

Namun, dia tidak menyebutkan perusahaan asing yang akan digaet untuk mengakuisisi PT Newmont Horas Nauli.

Menurut dia, Martabe sangat menarik dan cukup potensial untuk dieksplorasi.

Seperti diketahui, Martabe memiliki beberapa sasaran eksplorasi termasuk yang paling potensial seperti prospek Tor Sipalpal (Purnama) dan prospek yang lain meliputi Gunung Barani (Pelangi), Ramba Joring (Baskara) dan Tor Ulu-ala (Kejora).

Prospek-prospek ini membentang dengan jarak lebih dari enam kilometer. (K18)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: B 12

TAHUN 2006

Penjualan stok tembaga China tekan harga



SHANGHAI: Harga kontrak berjangka tembaga di Shanghai turun, di tengah spekulasi rencana pemerintah China yang akan menjual persediaan logam itu guna mengendalikan volatilitas harga logam yang cukup tinggi.

Biro persediaan komoditas China diperkirakan menjual sekitar 50.000-100.000 ton di pasar *spot*. Pada November dan Desember tahun lalu, biro ini juga telah menjual logam itu meneapai 51.160 ton untuk menekan kenaikan harga.

Harga tembaga untuk pengiriman Agustus di Shanghai Futures Exchange turun 3.680 yuan, mencapai batasan penurunan harian 5%, menjadi 70.200 yuan (US\$8.750) per ton. (BLOOMBERG/ADN)

35

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 812

TAHUN 2006

Harga aluminium di LME turun



SHANGHAI: Harga aluminium di London Metal Exchange turun setelah Alcoa Inc, produsen logam terbesar di dunia, dan serikat pekerja mencapai kesepakatan sementara terkait penyelesaian persoalan buruh.

Harga Aluminium untuk pengiriman tiga bulanan di bursa logam terbesar dunia, London, turun US\$17 menjadi US\$2.670 per ton. Sebelumnya harga kontrak komoditas tersebut sempat naik US\$37 atau 1,4% menjadi US\$2.687 per ton.

Tahun ini harga logam yang banyak digunakan kalangan industri minuman kaleng dan pesawat terbang diperkirakan naik 22%. (BLOOMBERG/ADN)

36

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : B 12

TAHUN 2006

Penguatan US\$ tekan harga emas Asia

BLOOMBERG

MELBOURNE: Harga emas di Asia turun, setelah nilai tukar dolar AS menguat terhadap euro dalam dua terakhir, sehingga mengurangi daya tarik logam mulia tersebut sebagai alternatif investasi.

Penguatan dolar AS diketahui terjadi di tengah ekspektasi peningkatan tingkat suku bunga The Fed.

Harga emas mengalami penurunan 11% sejak menyentuh level rekor tertinggi US\$730 per ounce pada 12 Mei.

"Jika Anda melihat arah suku bunga, maka Anda akan melihat pergerakan yang sangat besar. Arah pergerakan itu positif bagi dolar AS dan negatif bagi emas," ujar Darren Heathcote, Kepala Pialang N.M Rothschild and Sons Ltd di Sydney.

Sebagian besar pialang dengan persentase keyakinan 72%, percaya The Fed akan kembali menaikkan suku bunga menjadi 5,25% pada pertemuan dewan gubernur pada 29 Juni.

Sementara itu, jumlah pialang yang percaya tentang kenaikan suku bunga The Fed menjadi 5% belum lama ini, memiliki persentase keyakinan hingga mencapai 58%.

Harga emas untuk penyerahan segera turun US\$10,07 atau 1,6% menjadi US\$635,13

per ounce.

Nilai tukar dolar AS menguat menjadi US\$1,2779 per euro di New York.

Harga emas untuk penyerahan Agustus di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun US\$8,5 atau 1,3% menjadi US\$640,5 per ounce.

Komoditas tersebut sempat diperdagangkan pada level US\$640,70.

Jonathan Barrat, Kepala Divisi Valas dan Komoditas Logam AS Tricom Futures Pty, Sydney, menyebutkan selain karena menguatnya dolar AS, penurunan harga emas juga disebabkan berkurangnya daya tarik logam mulia itu sebagai alat lindung nilai terhadap dampak inflasi.

Dia mengatakan investor mulai mempertanyakan faktor-faktor yang memengaruhi harga emas seperti faktor geopolitik, minyak, dan inflasi.

"Mereka mempertanyakan kembali sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi pergerakan harga emas dan apakah harga komoditas sudah berada level yang sebenarnya," tambah dia.

Di India, negara konsumen emas terbesar di dunia, harga logam mulia untuk penyerahan Juni turun 51 rupee atau 0,5% menjadi 9.475 rupee per 10 gram atau 29.467 rupee (US\$636) per ounce. (r01)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI <u>JUN</u> JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN: 14 TAHUN 2006	

Polychem Indonesia looks to coal

JAKARTA: PT Polychem Indonesia, the country's second-largest chemical maker, plans to build coal-fired power plants and install steam boilers at its factories to cut costs after crude oil prices soared.

The company will spend US\$59.4 million in the next three years to switch from diesel to coal, Polychem said.

Polychem expects to reduce production costs by as much as Rp 262 billion (US\$28.2 million) annually after it switches to coal, the company said. It will build three power plants with a total capacity of 49 megawatts and install steam boilers at factories producing polyester and ethylene glycol, which is used as an engine coolant and antifreeze. —

Bloomberg